

**PENATAAN SARANA DAN PRASARANA OBYEK WISATA
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN PURWOREJO**

TESIS



**Disusun oleh
AGUNG WIBOWO
172203730**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

**PENATAAN SARANA DAN PRASARANA OBYEK WISATA
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN PURWOREJO**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Disusun oleh

AGUNG WIBOWO

172203730

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

TESIS

**PENATAAN SARANA DAN PRASARANA OBYEK WISATA
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN PURWOREJO**

Diajukan Oleh

AGUNG WIBOWO

172203730

Tesis ini telah disetujui

pada tanggal :.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak

Zulkifli, SE., MM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, September 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2019

AGUNG WIBOWO

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga bisa terselesaikanny penulisan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.
2. Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Zulkifli, SE., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Seluruh informan yang berkenan telah memberikan informasi kepada peneliti.
7. Isteriku Rita Purnama, S.STP dan anak-anakku, Alsa, Nisa serta Alya atas dorongan semangat dan cintanya,
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan serta dukungan semua pihak kami ucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, September 2019

AGUNG WIBOWO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Isu-isu Tata Ruang	9
2.1.2 Prinsip dasar Penataan Ruang	12
2.1.3 Prasarana dan Sarana Pariwisata	16
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	23

	2.2 Penelitian Terdahulu	25
BAB III	METODA PENELITIAN	28
	3.1 Desain Penelitian	28
	3.2 Tahap-tahap Analisis Pembangunan Sarana Prasarana	28
	3.3 Sumber Data	29
	3.4 Metode Pengumpulan Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	4.1 Data Penelitian	32
	Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana pariwisata di	
	4.2 Kabupaten Purworejo	33
	4.2.1 Pembangunan KPK Purworejo	34
	4.2.2 Pembangunan Pemasaran Pariwisata	37
	4.2.3 Industri Pariwisata Kabupaten	40
	4.2.4 Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten	43
	4.3 Usaha Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan	
	Ekonomi Masyarakat Kabupaten Purworejo	47
	4.3.1 Meningkatkan Obyek Dan Daya Tarik Wisata	47
	4.3.2 Analisis Terhadap Signifikasi Obyek Daya	
	Tarik Wisata	49
	4.3.3 Tingkat dukungan Sarana Prasarana Penunjang	50
	4.3.4 Pertimbangan Lainnya	51
	4.3.5 Perkembangan Jumlah wisatawan	51
	4.3.6 Pola Kedatangan dan Aksesibilitas	52

4.3.7	Kajian dan Analisis SDM Sektor Perhotelan	54
4.3.8	Kajian dan Analisis SDM Sektor Publik	56
4.4	Tindakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Mengembangkan Kebijakan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Purworejo	59
4.4.1	Meningkatkan Fasilitas Pariwisata	59
4.4.2	Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata.....	75
4.5	Analisis SWOT	79
4.5.1	Analisis dan Skenario Pengembangan	80
4.5.2	Pendekatan Pengelolaan Pariwisata	82
4.5.3	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo	99
	4.5.3.1 Kebijakan Visi	99
	4.5.3.2 Kebijakan Penataan Sarana Prasarana Obyek Wisata	100
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	102
5.1	Simpulan	102
5.2	Saran	102

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Obyek wisata di Kabupaten Purworejo.....	4
Tabel 4.1 Jumlah Pengunjung dan Pendapatan.....	33
Tabel 4.4.1.1 Hotel Penunjang Wisata	63
Tabel 4.4.1.2 Biro Perjalanan	65
Tabel 4.4.1.3 Rumah Makan	69
Tabel 4.4.1.6 Bank dan Money Changer	72

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.4.1.1 Peta Distribusi Fasilitas Penginapan	64
Gambar 4.4.1.2 Peta Distribusi Biro Perjalanan	67
Gambar 4.4.1.1 Peta Distribusi Rumah Makan	70
Gambar 4.4.1.1 Peta Distribusi Fasilitas Penginapan	64
Gambar 4.4.1.1 Peta Distribusi Fasilitas Penginapan	64

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRACT

Structuring and developing the tourism sector is one of the efforts that can increase local revenue. This study intends to find out and analyze the condition of tourism objects, the arrangement of facilities and infrastructure as well as the policies taken by the Regional Government in increasing the original income of the region.

The results of research conducted indicate that the facilities and infrastructure of tourist attractions in Purworejo Regency is quite large, supported by the existence of new accessibility in the form of an airport which is very close to Purworejo. In addition, the establishment of a Super Priority Tourism Area for the Borobudur Authority, located in Purworejo Regency, is an added value. Purworejo Regency through its Department of Tourism and Culture seeks to focus on increasing local revenue from the tourism sector. Various programs and activities that have been carried out have a positive impact on the community's economy. But there are still some obstacles that must be resolved, including the arrangement of traders, budget support and increasing human resources so that the arrangement of tourism facilities and infrastructure can really increase local revenue and improve the economy of the community.

Some improvements must be made immediately by Purworejo Regency in order to be able to realize its dreams, among others by increasing partnerships between institutions, making policies or regulations governing tourism and developing human resources. This step will provide greater leverage for Purworejo Regency to increase the original income of its region through the tourism sector, in addition to the arrangement of the area as well as its tourism facilities and infrastructure.

Keywords: facilities and infrastructure, tourism objects,

ABSTRAK

Penataan dan pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis kondisi objek pariwisata, penataan sarana dan prasarana serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana objek wisata di Kabupaten Purworejo cukup besar, ditunjang dengan adanya aksesibilitas baru berupa bandara yang jarak tempuhnya sangat dekat dengan Purworejo. Selain itu adanya penetapan Kawasan Pariwisata Super Prioritas untuk Badan Otorita Borobudur yang berlokasi di Kabupaten Purworejo menjadi nilai tambah tersendiri. Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya berupaya untuk fokus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Namun masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, antara lain penataan pedagang, dukungan anggaran serta peningkatan SDM agar penataan sarana dan prasarana pariwisata benar-benar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Beberapa pembenahan harus segera dilakukan oleh Kabupaten Purworejo agar bisa mewujudkan impiannya, antara lain dengan meningkatkan kemitraan antar lembaga, membuat kebijakan ataupun regulasi yang mengatur masalah pariwisata dan pengembangan sumber daya manusianya. Langkah tersebut akan lebih memberikan daya ungkit yang besar bagi Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui sektor pariwisata, disamping penataan kawasan serta sarana dan prasarana pariwisatanya.

Kata kunci: sarana dan prasarana, obyek wisata,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah yang makin luas pemerintah daerah dituntut kemampuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan diikuti peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan, serta mempersiapkan diri di dalam menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan upaya serta tahapan strategis di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Salah satu faktor pendukung yang diperhatikan yaitu dengan menarik para investor baik lokal regional, nasional, maupun global yang tertarik untuk membangun kawasan menjadi suatu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Semakin banyaknya investor yang turut serta di dalam suatu daerah, maka pendapatan di daerah tersebut akan meningkat sehingga pembangunan daerah tersebut berhasil dan dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Peningkatan PAD tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam melaksanakan strateginya. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* (*stratus* berarti militer dan *egos* berarti memimpin) yang merujuk pada seni perang jenderal militer dan berkaitan dengan tugas memimpin pasukan. Konsep ini pada jaman dahulu digunakan sebagai taktik dalam peperangan.

Sedangkan pada masa kini strategi lebih dipahami sebagai ujung tombak dari suatu perusahaan yang akan bertarung pada pasar, yang merupakan medan peperangan bisnis untuk memperebutkan pangsa pasar yang merupakan wilayah kekuasaan konkrit dari suatu perusahaan. Saat ini konteks strategi dapat pula diaplikasikan ke dalam instansi pemerintah. Menurut Stephanie K. Marrus (1995) Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pemerintah juga memerlukan strategi dalam mencapai sasaran jangka panjang, guna menghadapi persaingan global dalam era otonomi daerah. Strategi didasarkan jalan atau misi yang telah ditetapkan untuk menuju visi atau gambaran perubahan yang diinginkan. Dengan adanya visi dan misi, instansi pemerintah dapat menentukan strategi dan melaksanakan strategi yang diambil untuk menghadapi kendala atau masalah yang ada di lapangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Ensiklopede Nasional Indonesia Jilid 12 bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau serombongan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat di kota lain atau di negara lain dalam jangka waktu tertentu.

Pariwisata merupakan suatu industri yang banyak menghasilkan devisa bagi negara, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan sektor ini dengan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan pariwisata. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata di Indonesia diantaranya mengadakan sarana akomodasi yang memadai, promosi, kemudahan perjalanan, penambahan dan pengembangan kawasan pariwisata, dan terus mengupayakan produk wisata baru. Potensi pengembangan pariwisata dapat diukur dari tiga (3) komponen utama yaitu Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas atau biasa disebut 3A. Aspek Atraksi berkaitan dengan potensi dan daya tarik wisata baik berupa keindahan alam, aktivitas, adat istiadat maupun budaya setempat yang unik dan menarik. Aspek Aksesibilitas berkaitan dengan kemandirian lokasi untuk dijangkau dari wilayah lain seperti kondisi jalan, keberadaan sarana transportasi dan juga akses terhadap informasi dan komunikasi. Sedangkan Aspek Amenitas berkaitan keberadaan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata seperti penginapan, terminal wisata, pertokoan, pasar dan sebagainya.

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata nasional sangat didukung oleh peran dan program peningkatan serta pengembangan potensi pariwisata diseluruh wilayah Indonesia. Pariwisata juga merupakan sektor andalan dalam pembangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang sangat diperlukan dalam menyongsong otonomi daerah. Sektor pariwisata yang secara nasional telah dirancang sebagai tumpuan penghasil devisa non migas, maka berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah sudah

saatnya untuk memulai meningkatkan masuknya pendapatan dari luar daerah serta mendukung promosi dan pemasaran bagi potensi dan komoditi dari sektor-sektor lain.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang sangat potensial di bidang pariwisata. Adanya tiga (3) issue strategis nasional saat ini yaitu Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSPN) Badan Otorita Borobudur, Pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) dan Pembangunan Proyek Nasional Bendung Bener tentunya akan menjadi daya ungkit yang lebih besar untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo. Bahkan dari ketiga issue strategis nasional tersebut, dua diantaranya berada langsung di wilayah kabupaten Purworejo, yakni BO Borobudur dan Bendung Bener. Sedangkan pembangunan Bandara YIA merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi Kabupaten Purworejo mengingat jaraknya lebih dekat ke Purworejo dibandingkan dengan Wates ataupun Kota Yogyakarta.

Kabupaten Purworejo juga memiliki jenis obyek wisata yang lengkap yaitu : obyek wisata alam, wisata budaya dan obyek wisata pantai. Sebagai salah satu obyek wisata alam di Kabupaten Purworejo, saat ini menjadi aset wisata yang dapat diandalkan serta memiliki orientasi kedepan menambah pendapatan daerah. Obyek Wisata pantai merupakan obyek wisata yang memiliki potensi yang baik dengan pemandangan alamnya yang indah, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Purworejo. Permasalahan yang ada saat ini adalah kurang optimalnya penanganannya Kawasan Obyek Wisata pantai,

sehingga potensi yang ada tidak dapat diekspos secara maksimal, selain itu sarana dan prasarana yang ada belum memadai baik secara kualitas maupun secara kuantitas, hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada saat ini banyak yang rusak dan tidak berfungsi dan dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada kurang memenuhi kebutuhan pengunjung. Berbagai permasalahan tersebut sudah saatnya dicari suatu pemecahannya agar potensi yang ada dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan Pemda. Salah satu usaha untuk menaikkan jumlah wisatawan yaitu diperlukan adanya penataan dan penambahan jumlah fasilitas obyek wisata maupun jumlah pelayanannya, dalam hal ini dengan meningkatkan fasilitas akomodasi.

Obyek wisata di Kabupaten Purworejo yang dapat menambah pendapatan daerah yaitu:

Tabel 1.1 Tabel Obyek Wisata di Kabupaten Purworejo

OBYEK WISATA	2016	2017	2018
Pantai Jatimalang	Rp 596,400,000	Rp 568,525,000	Rp 553,390,000
Goa Seplawan	Rp 70,648,000	Rp 83,510,000	Rp 85,448,000
Geger Menjangan	Rp 14,777,000	Rp 17,729,000	Rp 19,157,000
Museum Tosan Aji		Rp 2,629,000	Rp 3,499,000
Kolam Renang Arta Tirta	Rp 499,765,000	Rp 689,695,000	Rp 892,308,000

Data: Sekunder Yang diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Pantai Jatimalang menunjukkan penurunan pendapatan dari tahun 2016 sampai 2018, sedangkan untuk Goa Seplawan, Geger Menjangan, Museum Tosan Aji dan kolam renang Arta Tirta menunjukkan peningkatan pada pendapatan dari hal tersebut sarana pariwisata di kawasan Obyek Wisata pantai maka diperlukan penataan dan

penambahan fasilitas wisata di kawasan tersebut. Penataan dan Pengembangan Sarana Rekreasi Wisata Alam pantai dimaksudkan sebagai usaha untuk menata kawasan wisata tersebut dan mengembangkannya sebagai suatu kawasan yang *representative* dengan mengangkat potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas obyek wisata maupun kualitas lingkungan sekitarnya. Penataan dan Pengembangan Sarana Wisata ini juga dimaksudkan sebagai penataan kawasan terpadu dengan memadukan beberapa kepentingan yang ada sehingga masing-masing kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan saling menunjang. Obyek wisata sebagai tujuan wisatawan diharapkan harus tetap dipertahankan kualitasnya. Penataan dan pengembangan sarana wisata diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap obyek wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga mampu lebih banyak lagi, menarik wisatawan yang datang. Upaya penataan dan pengembangan sarana rekreasi dimaksudkan untuk membuat suatu arahan atau pola baru tanpa meninggalkan konteks lingkungan yang sudah ada. Salah satu alternative pemecahannya adalah Penataan dan Pengembangan Sarana Rekreasi Wisata Alam pantai menjadi suatu obyek wisata.

Tujuan dari penelitian ini adalah menggali, mengungkap dan merumuskan potensi-potensi serta permasalahan yang berkaitan dengan penataan dan Pengembangan Sarana Rekreasi Wisata Alam pantai Purworejo, sehingga dapat diketahui pengadaan fasilitas wisata yang potensial dan sesuai dengan minat serta kebutuhan masyarakat sebagai pengguna utamanya pada

masa kini dan yang akan datang. Sedangkan sasaran penelitiannya adalah sebagai landasan program perencanaan dan perancangan Penataan dan Pengembangan Sarana Rekreasi Wisata Alam pantai dengan menciptakan suatu tempat rekreasi yang ideal, atraktif dan komersial, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi alamnya sehingga diperoleh keseimbangan, kelestarian alam yang akan diolah, pola tata ruang yang serasi, serta memiliki daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan menikmati sarana rekreasi yang tersedia.

1.2 Rumusan Masalah

Penataan sarana dan prasarana obyek wisata belum mampu meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana penataan sarana dan prasarana obyek wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo?
- b. Apakah penataan sarana dan prasarana pariwisata yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sudah sesuai untuk peningkatan PAD?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi penataan sarana dan prasarana obyek wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat subyektif dari penyusunan laporan penelitian adalah untuk memenuhi tugas akhir di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang nantinya digunakan sebagai pedoman.
- b. Manfaat obyektif yang dapat diambil yaitu sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang berkecimpung di marketing pariwisata pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan sebagai sumbangan terhadap perencanaan pengembangan Obyek Wisata pantai Purworejo.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Isu-Isu Penataan Ruang

Sebelum membahas prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan acuan dalam penataan ruang propinsi Jawa Tengah, pada bagian ini akan dibahas isu-isu penataan ruang. Isu-isu ini dapat merupakan isu nasional maupun yang spesifik propinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya penataan ruang Propinsi Jawa Tengah merupakan suatu implikasi dari yang tersendiri lagi menjadi bagian dari. Prinsip perencanaan tata ruangnya adalah dalam rangka pengembangan wilayah. Haruslah diperhatikan aspek-aspek yang mendasari pengembangan wilayah (*regional development*) seperti sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), serta dukungan pranata sistem (*institutional infrastructure*). Salah satu isu yang patut dipertimbangkan adalah implikasi demokratisasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan-keputusan publik. Hal ini merupakan inti dari reformasi yang kita cita-citakan yaitu timbulnya masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat yang egaliter berdasarkan kesetaraan. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan peranan yang cukup besar dalam penentuan “nasib”nya. Dalam kaitan tersebut, pendekatan perencanaan yang sentralistik dan *top-down* harus segera

direvisi menjadi pendekatan perencanaan yang lebih mengedepankan *demand* masyarakat yang disebut sebagai *community driven planning*. Isu yang paling aktual untuk saat ini adalah bagaimana upaya untuk mencapai kondisi di mana masyarakat sendirilah yang mendesain rencana yang diinginkan dan pemerintah adalah fasilitatornya. Hal ini sangat penting dalam penataan ruang wilayah dan perkotaan. Isu lain yang hendak dibahas adalah terkait dengan akselerasi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu propinsi, hendaknya mengambil momen yang sangat baik ini untuk meraih dukungan bagi pengembangan wilayahnya. Contoh dukungan ini dapat terlihat jelas dengan pembentukan/pengalihan status negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Dalam kaitan tersebut, potensi yang sudah ada hendaknya didayagunakan dan didorong secepatnya, seperti: potensi wisata bahari dan pantai di sepanjang pantai selatan dan barat, dan wisata budaya. Dilihat dari letak geografisnya, Propinsi merupakan Pulau Jawa dari Pulau Sumatera Pelabuhan Merak. Di sekitar pelabuhan inilah banyak berkembang kawasan industri dan tempat wisata. Dari segi infrastruktur wilayah, walaupun belum memadai, telah terdapat jaringan jalan yang melintasi seluruh kawasan pantai sampai dengan perbatasan Kab. Sukabumi. Propinsi Banten juga mendapatkan keuntungan lokasional dengan berbatasan dengan Jakarta (Jabotabek) dan Lampung. Luapan (*spill over*) dari Jakarta dapat

merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Propinsi Banten. Selain itu, pengembangan wisata bahari Gunung Krakatau dan Anak Gunung Krakatau juga terkait dengan Propinsi Lampung. Namun demikian, Propinsi Banten hendaknya juga menyadari beberapa ketertinggalannya dari daerah lain. Di Propinsi Banten masih terdapat banyaknya desa-desa miskin serta masih rendahnya pendapatan asli daerah. Salah satu konsekuensi negatif dari diberlakukannya otonomi daerah kondisi antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya, demi sekedar mengejar target dalam lingkup “kacamata” masing-masing. Kondisi tersebut akan menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak diikat dengan satu kerangka keterpaduan yang mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih luas dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Prasarana yang bersifat tunggal dan melayani wilayah sekitarnya (prasarana wilayah) seperti pelabuhan, sangatlah tidak efisien apabila harus dibangun pada setiap daerah. Karena itu haruslah dicari suatu sinergi yang baik dalam mengupayakan ketersediaan prasarana sejenis yang secara hirarki fungsional dia dapat melayani kebutuhan kebutuhan yang tidak hanya menguntungkan pembangunan daerah tetapi juga wilayah dan nasional. Sebagai contoh, prasarana jalan secara sistem berhirarki mulai dari jalan arteri, kolektor, dan lokal yang secara keseluruhan mendukung

kelancaran sistem aktivitas dan produksi baik dari asal bahan baku maupun menuju outlet-nya. Begitu pula dengan sistem kota-kota yang terdiri dari fungsi pelayanan kegiatan nasional, wilayah, maupun lokal. Kota-kota tersebut secara hirarki fungsional melayani penduduk kotanya maupun wilayah sekitarnya.

2.1.2 Prinsip Dasar Penataan Ruang

Ada banyak teori pengembangan wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan ruang Kabupaten Purworejo. Secara umum teori pengembangan wilayah maupun penataan ruang sudah berkembang jauh dari sejak dikembangkannya pada tahap awal. Teori-teori pengembangan wilayah menganut berbagai azas atau dasar dari tujuan penerapan masing-masing teori. Kelompok pertama adalah teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah (*local prosperity*). Kelompok kedua menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam yang dinilai sangat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (*sustainable production activity*). Kelompok ini sering disebut sebagai sangat peduli dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kelompok ketiga memberikan perhatian kepada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sehingga kajian terfokus kepada governance yang bisa bertanggung jawab (*resposnsible*) dan berkinerja bagus (*good*). Kelompok keempat perhatiannya tertuju

kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (*people prosperity*).

Dalam kaitan tersebut keseluruhan kelompok teori tersebut tidak seluruhnya bertentangan satu dengan yang lainnya, namun dalam penggunaannya dapat dijadikan suatu sinergi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang didalamnya terkandung muatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Konsep dasar penataan ruang wilayah dan kota dengan pendekatan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarananya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan

berlakunya UU No. 22 tahun 1999, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan *bottom-up* dan melibatkan semua pelaku pembangunan (*stakeholders*) pada setiap tahap pembangunan. Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat. Pertama, adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah, sebagaimana digariskan oleh UU 22/1999, memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Depkimpraswil. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian

pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (*genuine*) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan

Pemerintah pusat merupakan “penjaga” kepentingan nasional. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam konteks pengembangan propinsi Banten, Pemerintah Propinsi harus memposisikan dirinya sebagai “pengemban amanat kabupaten-kabupaten” di wilayahnya. Sebagaimana arahan PP No. 25 Tahun 2000, pemerintah propinsi berkewajiban untuk mengelola hal-hal yang lintas kabupaten seperti: prasarana wilayah lintas kabupaten (jalan arteri, sungai, danau, waduk dsb.), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pemanfaatan ruang lintas kabupaten, dan fasilitas kerjasama lintas kabupaten.

Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar

pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian *community driven planning* tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan.

Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pengembangan wilayah dan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.

2.1.3 Prasarana dan Sarana Pariwisata

Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (Suwanto, 1997: 21).

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah

tujuan wisata seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan prasarana wisata diperlakukan koordinasi yang mantang antara instansi terkait bersama dengan instalasi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata di daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata.

Pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah dan sebagainya yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja. Yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian, dalam hal ini adalah sektor pariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi fungsinya adalah melengkapi sarana kepariwisataan sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan

berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Suwanto (2004:21)

Prasarana khusus bagi pariwisata dapat dikatakan tidak ada. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri. Disamping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotik. Untuk lebih jelasnya Prasarana dibagi atas tiga komponen :

a. Prasarana Umum

Yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan umum bagi kelancaran perekonomian. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya ialah :

- 1) Jaringan Air bersih,
- 2) Jaringan Listrik,
- 3) Jaringan Jalan,
- 4) Dainase : Sanitasi dan Penyaluran Limbah
- 5) Sistem Persampahan dan
- 6) Jaringan Telekomunikasi dan Internet

- b. Prasarana Penunjang (RS, Apotek, Pusat Perdagangan, Kantor Pemerintah, Perbankan)
- c. Prasarana Wisata (Kantor Informasi, Tempat Promosi dan Tempat Rekreasi , pengawas pantai)

Ada tiga kategori yang termasuk dalam prasarana (*infrastructures*), masing-masing adalah:

- a. Prasarana Umum (*General Infrastructures*) meliputi prasarana umum, mencakup hal-hal sebagai berikut sistem penyediaan air bersih, tenaga listrik, jalan dan jembatan, pelabuhan, airport, terminal atau stasiun kereta api.
- b. Kebutuhan Masyarakat Banyak (*Basic Needs of Civilized Life*)
Kebutuhan pokok manusia modern, seperti: kantor pusat dan telepon, rumah sakit, apotik bank, pusat-pusat perbelanjaan, bar dan restoran, salon kecantikan., barbershop, kantor polisi, toko obat, penjualan rokok, toko kacamata, toko-toko penjual Koran dan majalah, pompa bensin bengkel mobil, wartel, warnet dan lainnya.
- c. Prasarana Kepariwisataaan
 - 1) *Residential tourist plants.*
 - 2) Semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah semua bentuk akomodasi yang diperuntukan bagi wisatawan dan

juga segala bentuk rumah makan dan restoran yang ada. Misalnya hotel, motor hotel (motel), wisma, *homestay*, *cottages*, *camping*, *youth hostel*, serta rumah makan, restoran, *self-services*, *cafeteria*, *coffee shop*, *grill room*, *bar*, *tavern*, dan lain-lain

3) *Receptive tourist plants*

Segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata.

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

Sarana wisata secara kuantitatif menunjukkan pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan

wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan diisediakannya (Suwanto, 1997: 23).

Sarana pariwisata adalah hal-hal yang keberadaannya adalah berhubungan dengan usaha untuk membuat wisatawan lebih banyak datang, lebih banyak mengeluarkan uang di tempat yang dikunjunginya. Dalam kepariwisataan dikenal ada tiga macam sarana, yakni:

a. Sarana Pokok Kepariwisata (*main tourism superstructure*)

Yakni perusahaan-perusahaan yang fungsinya adalah menyediakan fasilitas pokok kepariwisataan. Sarana ini juga dibagi ke dalam tiga bagian, antara lain:

1) *Receptive Tourist Plan*

Adalah perusahaan yang mempersiapkan perjalanan dan penyelenggaraan tour, *sightseeing* bagi wisatawan.

Contoh : *travel agent, tour operator, tourist transportation*, dan lain-lain.

2) *Residential Tourist Plan*

Adalah perusahaan yang memberikan pelayanan untuk menginap,

Contoh : hotel, motel, dan jenis akomodasi lainnya.

3) **Sarana Pelengkap Kepariwisataaan** (*supplementing tourism superstructure*)

Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan atau tempat yg menyediakan fasilitas yang fungsinya melengkapi sarana pokok dan membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal di suatu DTW. (Suwantoro, 1997)

- a) Sarana Ketangkasan
- b) Perlengkapan wisata atau fasilitas rekreasi dan olah raga air.

4) **Sarana Penunjang Kepariwisataaan** (*supporting tourism superstructure*)

Sarana Penunjang Kepariwisataaan adalah perusahaan yg menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok. Berfungsi tidak hanya membuat wisatawan tertahan lebih lama tetapi berfungsi agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan uang di daerah yang dikunjunginya seperti :

- a) Karaoke/ *Entertaint*
- b) Ruang Atraksi Wisata

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif merujuk pada jumlah sarana wisata yang harus

disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber -sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

Pasal 1 ayat 15 Undang -undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2012; 101). Berdasarkan penjelasan dari UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas bahwa sumber pendapatan daerah itu bagian dari sumbangsih sukarela dari semua penghasil seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sehingga dapat diketahui dalam pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Penelitian Terdahulu

- a. Titis Ariani Mustikawati (2017) Analisis Pengembangan Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam Telaga Ngebel dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan penelitian mengenai peran Disbudparpora dalam pengembangan obyek wisata Telaga Ngebel mendapatkan hasil dalam perencanaan yang meliputi daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana serta aksesibilitas, dan juga perencanaan promosi.

Mengimplementasikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada aspek ekonomi. Berperan dalam membuat peraturan pariwisata yang dilimpahkan kewenangannya kepada perangkat desa Ngebel. Pelaksanaan pengembangan obyek wisata Telaga Ngebel diketahui berjalan sesuai rumusan perencanaan. Meskipun belum semua perencanaan pengembangan dapat terlaksana, namun hal tersebut sudah sedikit banyak membawa perubahan yang jauh lebih baik pada obyek wisata Telaga Ngebel. Pemasangan lampu jalan, perbaikan dermaga, program tertib dan rapi terhadap pedagang kaki lima, serta penyelenggaraan berbagai acara seperti pentas musik dan pentas Reyog setiap dua bulan sekali sebagai upaya dalam menarik kunjungan wisatawan.

- b. Rina Masruroh dan Neni Nurhayati (2016), Strategi Pengembangan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan, hal ini didukung dengan tingginya potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, fakta di lapangan bertolak belakang dengan harapan yang ada, Pendapatan Asli

Daerah dari sektor pariwisata masih relatif kecil, sehingga diperlukan strategi pengembangan Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Kuningan harus memiliki kawasan unggulan destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan dengan pertimbangan multilyer efek secara ekonomi. Strategi yang dapat dilakukan adalah komitmen pemerintah mengenai fokus pembangunan pariwisata daerah, meluncurkan konsep City branding sebagai ikon pariwisata yang khas, meningkatkan kemitraan dan hubungan antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, dukungan regulasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia. Strategi tersebut dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata di Kabupaten Kuningan.

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan, atau fenomena sosial tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo dan Mukhtar, 2000: 15).

3.2 Tahap-tahap Analisis Pembangunan Sarana Prasarana

- a. Analisis terhadap jenis potensi obyek dan daya tarik wisata

Meliputi pemetaan terhadap potensi daya tarik wisata, pembuatan perencanaan (*master plan*). Selain itu juga didasarkan pada minat wisatawan dan potensi atraksi yang merupakan kearifan lokal dari obyek daya tarik wisata.

- b. Analisis terhadap perkembangan obyek dan daya tarik wisata

Perkembangan obyek wisata sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar atau konsumen. Pengembangannya didasari oleh perencanaan yang baik serta mengikuti dengan perkembangan jaman namun tidak meninggalkan unsur konservasi.

3.3 Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu memanfaatkan data-data sekunder yang tersedia
- b. Wawancara mendalam (*in depth interview*), untuk mendapatkan data kualitatif serta beberapa keterangan yang tidak diperoleh dari data sekunder tersebut diatas.
- c. Pengamatan atau observasi langsung terhadap obyek penelitian untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena penelitian yang ada.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data primer digunakan untuk memperkaya dan mempertajam analisis bagi penarikan kesimpulan, yang meliputi wawancara mendalam (*in depth*

interview) yang dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang mengetahui fenomena yang ingin diketahui .

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berupa angka atau penjelasan mengenai suatu peristiwa yang berkaitan dengan fenomena penataan pedagang kaki lima yang meliputi sumber data berikut ini:

1. Data berupa angka atau tabel dari data inventarisasi.
2. Sumber lain yang berasal dari kepustakaan.

Ada dua teknik analisis data (Sugiyono, 2009:429) yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif analisis untuk mengungkapkan atau menggambarkan mengenai keadaan atau fakta yang akurat dari obyek yang diamati, yang disesuaikan dengan teori atau dalil yang berlaku dan diakui. Untuk itu fenomena mengenai penanganan masalah, baik yang menyangkut data primer, sekunder atau analisis *stakeholder* akan dilakukan untuk memperoleh informasi dan hubungan antar variabel secara kuat dan mendalam.
2. Teknik sintesis preskriptif dengan tujuan untuk membangun kembali hasil analisis kritis yang dilakukan yang dapat diartikan ke dalam variabel penelitian (faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan kawasan wisata, sehingga diperoleh pengertian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi itu).

Dunn (dalam Darwin, 2001: 32) mengemukakan bahwa dalam analisis kebijakan publik, maka pendekatan atau teknik preskriptif bergerak lebih lanjut pada tindakan pengajuan saran (rekomendasi) mengenai apa yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu masalah public secara lebih baik. Jadi pendekatan ini menawarkan jalan pemecahan terhadap masalah praktis pada tataran kebijakan publik.

Metode bahasan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.

STIE Widya Wiyaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. (2004). Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia, Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan. Yogyakarta.
- Erna Widodo dan Mukhtar. (2000). Konstruksi Ke arah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1990, Surabaya, PT. Delta Pamungkas.
- Fandeli, C. 1995. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Liberty Offset. Yogyakarta.
- Fandeli, C dan Mukhlison. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Unit KSDA Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fandeli, C, 2001. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Liberty. Yogyakarta.
- Marrus, Stephanie K, (1995). Building the Strategic Plan,
- Marpaung, H. 2002. Pengantar Kepariwisata. Alfabeta. Bandung. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mill, Robert, dan Morrison. 1985. The Tourism System. New Jarsley: Prentice hall International
- M, Stiefel dan Wolfe, M. 1994. Voice For The Excluded, Popular Participation for Development, Utopia or Necessity? Zed Book Association With United Nation of Research Development. Geneva
- Rina Masruroh dan Neni Nurhayati (2016), Strategi Pengembangan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan.
- Suwantoro, Gamal (2005). Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta, Andi Offset
- Shackley, Myra. 1996. Wildlife Tourism. London : International Thomson Business Press
- Spillane, James J. 1994. Pariwisata Indonesia. Yogyakarta: Kanisius
- Titis Ariani Mustikawati. (2017). Analisis Pengembangan Sarana Prasarana

Obyek Wisata Alam Telaga Ngebel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 53 No.2 Desember 2017.

-----,Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Wahab, Salah. 1996. Manajemen Kepariwisataa. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Yoeti, Oka. 1995. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta: Angkasa

Yoeti, Oka, dkk. 2006. Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Yoeti, Oka. 2006. Tours And Travel Marketing. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat